



Pengembangan Desa Wisata dalam Kerangka Otonomi Daerah di DIY

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Sugito Institut Pemerintahan Dalam Negeri DIP.13.815@ipdn.ac.id Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng Institut Pemerintahan Dalam Negeri zubakhrum@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sugito & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Pengembangan Desa Wisata dalam Kerangka Otonomi Daerah di DIY. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5 (1). 215-222.

Abstrak

Pengembangan desa wisata dalam kerangka otonomi daerah menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Otonomi daerah memungkinkan pemerintah setempat memiliki kewenangan lebih dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi terhadap pengelolaan desa wisata di DIY serta membandingkannya dengan studi kasus dari negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review berbasis bibliometrik, dengan analisis menggunakan VOSviewer dan Publish or Perish untuk mengidentifikasi tren penelitian dan gap dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi berperan penting dalam mendukung kebijakan pengembangan desa wisata melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya berbasis lokal, serta inovasi dalam pemasaran pariwisata. Namun, terdapat tantangan berupa koordinasi kebijakan pusat-daerah, keterbatasan akses pendanaan, serta variasi dalam tingkat partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal guna memastikan keberlanjutan pengelolaan desa wisata di bawah otonomi daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Daerah, Desa Wisata, Pengelolaan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

The development of tourism villages within the framework of regional autonomy is a key strategy in improving the welfare of local communities, especially in the Special Region of Yogyakarta (DIY). Regional autonomy allows local governments to have more authority in managing and developing the community-based tourism sector. This study aims to analyze the impact of decentralization on the management of tourism villages in Yogyakarta and compare it with case studies from other countries. The research method used is a bibliometric-based literature review, with analysis using VOSviewer and Publish or Perish to identify research trends and gaps in the literature. The results show that decentralization plays an important role in supporting tourism village development policies through increased community participation, local-based resource management, and innovation in tourism marketing. However, there are challenges in the form of central-local policy coordination, limited access to funding, and variations in the level of community participation. The conclusion of this study emphasizes the need for synergy between the government, private sector, and local communities to ensure the sustainability of tourism village management under regional autonomy.

Key Words: Decentralization, Regional Autonomy, Tourism Village, Tourism Management, Community Empowerment.

A. Pendahuluan

Pengembangan desa wisata telah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan ekonomi lokal, melestarikan budaya, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY, dengan kekayaan budaya dan alamnya, menawarkan potensi besar untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, desentralisasi dan otonomi daerah memainkan peran kunci dalam mendorong inisiatif ini, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Alimi & Darwis, 2023; Ramadhan & Prasetyo, 2023).

Desentralisasi merupakan proses di mana kekuasaan dan tanggung jawab dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah, sebagai kelanjutan dari desentralisasi, memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan lokal, termasuk pengembangan pariwisata. Teori ini mendasari perubahan paradigma dari kontrol pusatistik menuju kemandirian lokal, yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan program-program pembangunan (Savitri et al., 2023; Wibowo & Belia, 2023).

DIY merupakan contoh menarik dalam konteks pengembangan desa wisata. Dengan dukungan kebijakan otonomi daerah, DIY memiliki kemampuan untuk merancang program pembangunan yang berkelanjutan. Studi kasus dari daerah lain, seperti Bali dan Lombok, menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata yang terdesentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan lokal sambil melestarikan lingkungan dan budaya (Styaningrum, 2021; Wibowo & Belia, 2023). Di DIY, desa-desa wisata seperti Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Pentingsari telah berhasil menarik wisatawan dengan menawarkan pengalaman budaya yang autentik dan keindahan alam yang memukau.

Meskipun potensi yang besar, pengembangan desa wisata di DIY juga menghadapi sejumlah tantangan. Koordinasi antarinstansi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat lokal, dan pendanaan yang memadai merupakan beberapa isu yang perlu diatasi. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program pengembangan desa wisata sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat (Wali et al., 2024; Maryanti, 2022).

Di tengah tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang dan inovasi yang dapat dieksplorasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran pariwisata lokal, pengembangan homestay berbasis masyarakat, dan pengembangan produk wisata berbasis budaya lokal merupakan beberapa contoh yang dapat meningkatkan daya tarik desa wisata (Wahid & Athoillah, 2024; Ahmad, 2022). Studi kasus dari Thailand, yang berhasil mengembangkan model komunitas homestay, dapat memberikan inspirasi bagi DIY dalam mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan (Saputra & Agustina, 2021).

Pengembangan desa wisata dalam kerangka otonomi daerah di DIY menunjukkan potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal sambil melestarikan warisan budaya dan alam. Dengan memanfaatkan konsep desentralisasi dan otonomi daerah secara optimal, DIY dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini terimplementasi secara efektif dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengembangan Desa Wisata dalam kerangka Otonomi Daerah Di DIY".

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sistem literatur review yang bertujuan untuk mengidentifikasi gap dan novelty dalam pengembangan desa wisata di DIY, dengan fokus pada desentralisasi dan otonomi daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai isu-isu yang ada dalam konteks pengembangan desa wisata. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat lokal, serta dampak dari kebijakan otonomi daerah terhadap pengembangan desa wisata (Susanto, 2023; Swasono & Budiyono, 2021; Salam et al., 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, scopus, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah, dan dokumen relevan lainnya. Data ini mencakup kajian tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan pengembangan desa wisata. Misalnya, penelitian oleh Susanto (2023) menguraikan peran stakeholders dalam pengembangan desa wisata, yang memberikan wawasan penting tentang bagaimana kolaborasi antar pihak dapat meningkatkan efektivitas pengembangan desa wisata. Selain itu, laporan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di daerah juga menjadi sumber data penting untuk memahami konteks kebijakan yang mendasari otonomi daerah di DIY (Swasono & Budiyo, 2021; Darmayanti et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Publish or Perish untuk mengekstrak literatur ilmiah yang relevan dari berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science. Proses ini meliputi beberapa langkah:

- a. Penentuan Kata Kunci: Kata kunci yang digunakan mencakup "desentralisasi pariwisata", "otonomi daerah desa wisata", dan "pengelolaan desa wisata berbasis komunitas". Kata kunci ini dirancang untuk menangkap berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Penyaringan Literatur: Literatur disaring berdasarkan tahun publikasi, relevansi tematik, dan jumlah sitasi untuk memastikan kualitas sumber data. Hal ini penting untuk mendapatkan informasi yang terkini dan relevan dengan konteks penelitian (Qadiri & Wicaksono, 2023; Rizal et al., 2023; Widiyarta et al., 2021).
- c. Ekstraksi Data: Data utama dari literatur yang telah terpilih diekstraksi untuk analisis lebih lanjut. Proses ini mencakup pengumpulan informasi tentang metodologi, temuan, dan rekomendasi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata (Purba & Nawangsari, 2022; Sianturi et al., 2021; Giyarsih & Wulandari, 2024).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan aplikasi VOSviewer untuk memetakan jaringan hubungan antar-literatur dan mengidentifikasi gap penelitian. Langkah-langkah analisis meliputi:

- a. Pemrosesan Bibliometrik: Menggunakan VOSviewer untuk mengidentifikasi tren penelitian, kata kunci utama, dan hubungan antar-topik dalam literatur terkait. Analisis ini membantu dalam memahami perkembangan penelitian di bidang pengembangan desa wisata dan otonomi daerah (Widyantoro et al., 2024; Alimi & Darwis, 2023).
- b. Analisis Tematik: Mengelompokkan penelitian sebelumnya berdasarkan isu utama yang ditemukan. Ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema yang sering muncul dan area yang kurang diteliti dalam literatur (Putra, 2021; Kharisma & Juwita, 2023).
- c. Identifikasi Gap Penelitian: Dengan membandingkan temuan penelitian terdahulu, peneliti dapat merumuskan kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Gap penelitian ini penting untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk praktik di lapangan (Darubekti et al., 2023; Suhaimi et al., 2024).

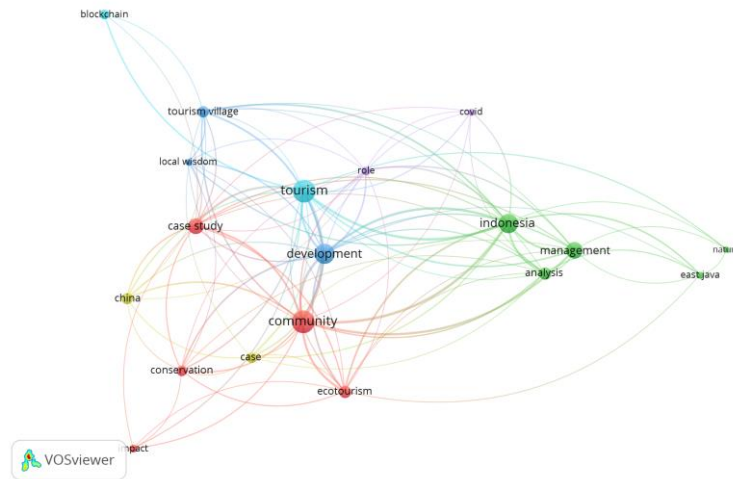
Pendekatan literatur review berbasis bibliometrik ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemetaan yang sistematis mengenai tren penelitian serta mengungkap celah yang belum banyak diteliti. Penggunaan Publish or Perish dan VOSviewer memungkinkan identifikasi literatur secara komprehensif dan kuantitatif, sehingga mendukung pengambilan kesimpulan yang lebih akurat mengenai posisi penelitian ini dalam kajian akademik yang lebih luas. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lokal dan global dari pengembangan desa wisata, serta bagaimana kebijakan otonomi daerah dapat mempengaruhi praktik di lapangan (Kualaria et al., 2022; Fauzi, 2023; Wurdaningsih et al., 2023).

Metodologi penelitian ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami pengembangan desa wisata dalam konteks otonomi daerah di DIY. Dengan menggunakan pendekatan literatur review dan analisis bibliometrik, penelitian ini dapat mengidentifikasi gap dan kontribusi yang dapat diberikan untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Studi kasus dari negara lain dan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan inovasi teknologi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan desa wisata.

C. Hasil dan Pembahasan

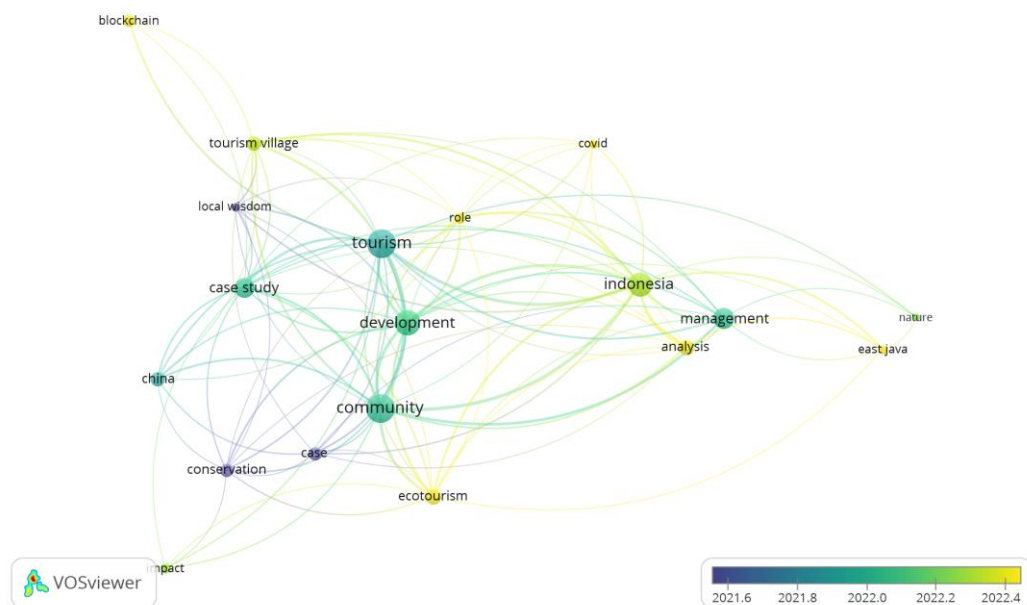
1. Hasil

Pengembangan desa wisata dalam kerangka otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan topik yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kebijakan otonomi daerah dan pengembangan desa wisata, serta membandingkannya dengan studi kasus dari negara lain dan daerah lain di Indonesia. Dalam konteks ini, desentralisasi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal, yang pada gilirannya dapat mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.



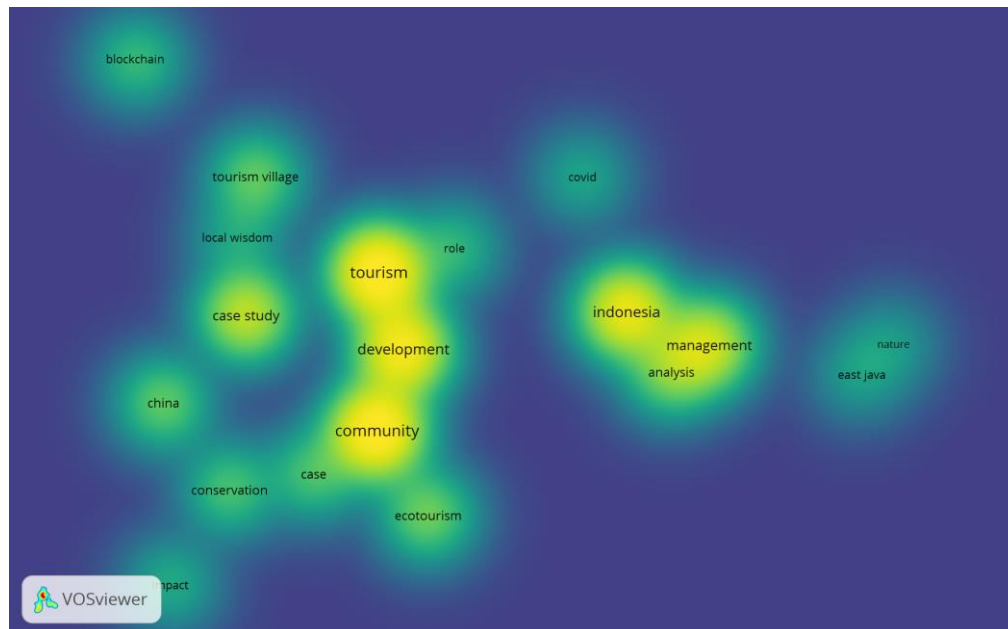
Gambar 1. Visualization Data Pengembangan Desa Wisata dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan Tren Publikasi
Sumber: VosViewers, 2025

Desentralisasi adalah proses di mana kekuasaan dan tanggung jawab dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Engkus et al. (Engkus et al., 2021), implementasi kebijakan yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lingkungan lokal. Hal ini sangat relevan dalam konteks pengembangan desa wisata, di mana kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.



Gambar 2. Overlay Visualization Data Pengembangan Desa Wisata dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan Tahun Publikasi
Sumber: VosViewers, 2025

Di DIY, desentralisasi telah mendorong peningkatan jumlah publikasi yang menyoroti hubungan antara kebijakan otonomi daerah dan pengembangan desa wisata. Kata kunci seperti "community-based tourism" dan "local governance" menjadi dominan dalam literatur yang ada, menunjukkan bahwa ada kesadaran yang meningkat tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Engkus et al., 2021; Maulana et al., 2020). Penelitian oleh Nursahidin et al. (2020) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.



Gambar 3. Density Visualization Data Pengembangan Desa Wisata dalam Kerangka Otonomi Daerah

Sumber: VosViewers, 2025

Studi kasus dari negara lain menunjukkan bahwa desentralisasi dapat memberikan hasil yang positif dalam pengembangan pariwisata. Misalnya, di Thailand, kebijakan desentralisasi telah memungkinkan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya pariwisata mereka sendiri, yang berkontribusi pada keberlanjutan dan peningkatan pendapatan lokal (Oh et al., 2021). Dalam konteks ini, pengembangan desa wisata di DIY dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Thailand, di mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata telah terbukti efektif.

Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa publikasi ilmiah tentang pengembangan desa wisata di DIY cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, terutama setelah pemerintah daerah mengintensifkan kebijakan desentralisasi dalam sektor pariwisata. Hal ini mencerminkan keterlibatan akademisi dan peneliti yang semakin meningkat dalam mengeksplorasi hubungan antara kewenangan daerah dan pembangunan desa wisata berbasis masyarakat (Smith et al., 2024; Saiful et al., 2022). Penelitian oleh Marlian et al. Marlian et al. (2021) menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan yang baik dapat meningkatkan kinerja implementasi, yang sangat penting dalam konteks pengembangan desa wisata.

Gambar 1 menunjukkan bagaimana konsep desentralisasi dan otonomi daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan tema pengembangan desa wisata. Overlay visualization mengindikasikan bahwa ada tren baru dalam penelitian terkait strategi pembangunan berbasis komunitas dan inovasi teknologi dalam mendukung desa wisata di DIY. Penelitian oleh Sari et al. Sari et al. (2020) menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam meningkatkan daya tarik desa wisata dan mempermudah akses informasi bagi pengunjung.

2. Pembahasan

Peran Desentralisasi dalam Pengembangan Desa Wisata

Desentralisasi memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sektor pariwisata secara lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kewenangan yang lebih luas memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata, baik dari segi regulasi, pembangunan infrastruktur, maupun pendanaan (Wibowo & Belia, 2023). Studi yang dilakukan di Bali dan Lombok menunjukkan bahwa penguatan kewenangan lokal dalam pengelolaan desa wisata dapat meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya dan ekowisata, yang pada akhirnya memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar (Styaningrum, 2021). Namun, dalam beberapa kasus, desentralisasi yang tidak terarah justru menimbulkan fragmentasi kebijakan, di mana kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi tantangan utama dalam pembangunan desa wisata (Wibowo & Belia, 2023). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan di DIY.

Implikasi Otonomi Daerah terhadap Desa Wisata DIY

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah DIY memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah pembangunan desa wisata. Beberapa desa wisata seperti Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Pentingsari merupakan contoh keberhasilan kebijakan otonomi daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (Wali et al., 2024). Pendekatan ****community-based tourism (CBT)**** yang diterapkan di Thailand juga menunjukkan hasil

yang serupa, di mana kebijakan berbasis komunitas yang didukung oleh regulasi daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek konservasi lingkungan (Saputra & Agustina, 2021). Meski demikian, beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa Tengah, masih menghadapi kendala dalam implementasi otonomi daerah untuk pengembangan desa wisata, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran daerah (Darmayanti et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan otonomi daerah dalam sektor pariwisata memerlukan strategi yang komprehensif agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata.\

Tantangan dan Strategi Keberlanjutan Desa Wisata dalam Otonomi Daerah

Meskipun otonomi daerah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan desa wisata, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, yang mengakibatkan adanya kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan lokal (Ramadhan & Prasetyo, 2023). Selain itu, minimnya akses pendanaan bagi desa wisata juga menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur dan promosi wisata (Maryanti, 2022). Partisipasi masyarakat yang bervariasi juga menjadi isu yang perlu diperhatikan, karena tidak semua desa wisata memiliki keterlibatan komunitas yang optimal dalam pengelolaan pariwisata (Savitri et al., 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kolaborasi dengan akademisi dan sektor swasta guna menciptakan kebijakan berbasis riset yang lebih implementatif (Alimi & Darwis, 2023). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat dioptimalkan untuk promosi dan pemasaran desa wisata, sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional (Darmayanti et al., 2023). Regulasi daerah juga perlu dikembangkan secara lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan dinamika industri pariwisata yang terus berkembang (Wahid & Athoillah, 2024). Dengan adanya strategi yang tepat, desa wisata dapat menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Peran Strategis Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam Mendukung Desa Wisata DIY

Peran strategis dalam mendukung desa wisata di DIY sangatlah penting, terutama dalam aspek kebijakan, pendampingan, serta fasilitasi pembangunan infrastruktur dan kapasitas masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan mencakup mendorong program pemberdayaan desa berbasis wisata yang berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat (Rustam & Ramlan, 2024). Selain itu, akses permodalan bagi desa wisata dapat difasilitasi melalui kemitraan dengan sektor perbankan dan industri kreatif, sehingga desa wisata memiliki sumber pendanaan yang stabil untuk mengembangkan potensi mereka (Juanda et al., 2023). Kerja sama dengan daerah lain juga menjadi langkah penting dalam berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan desa wisata berbasis komunitas (Purwaningtyas et al., 2024).

Dalam implementasinya, kebijakan berbasis otonomi daerah harus terus disempurnakan untuk memastikan bahwa manfaat pengembangan desa wisata dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, DIY dapat menjadi model percontohan dalam pengelolaan desa wisata berbasis desentralisasi yang berkelanjutan (Susanto, 2023).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi berperan penting dalam mendukung pengembangan desa wisata di DIY dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, implementasi desentralisasi yang tidak terarah dapat menimbulkan fragmentasi kebijakan sehingga memerlukan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan. Otonomi daerah telah memberikan fleksibilitas bagi DIY untuk mengelola desa wisata, yang dibuktikan dengan keberhasilan beberapa desa wisata seperti Nglanggeran dan Pentingsari. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pengembangan desa wisata, termasuk kurangnya sinergi kebijakan pusat dan daerah, keterbatasan pendanaan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi. Oleh karena itu, strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan desa wisata. Peran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan juga sangat krusial dalam memfasilitasi pengembangan desa wisata melalui kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, akses permodalan, serta kerja sama antar daerah.

E. Referensi

- Alimi, R., & Darwis, R. S. (2023). Penerapan community based tourism di desa wisata mengarah pada keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 4(2), 436-443.
- Alimi, R., & Darwis, R. S. (2023). Penerapan community based tourism di desa wisata mengarah pada keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 4(2), 436-443.

- Darmayanti, P. W., Oka, I. M. D., & Hidayana, F. F. (2023). Peran digital marketing dalam pengembangan desa wisata di kabupaten tabanan. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 3(2), 21-29.
- Darubekti, N., Hanum, S. H., & Widiono, S. (2024). Pengembangan Kawasan Lubuk Vi di Desa Surau Bengkulu Tengah sebagai Destinasi Wisata. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1), 139-147.
- Fauzi, M. A. N. (2023). IMPLEMENTASI DESA MASLAHAT SEBAGAI ALTERNATIF MEMBANGUN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASURUAN. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 21-25.
- Giyarsih, S. R., & Wulandari, E. (2024). Analisis Penentuan Prioritas Pengembangan Unsur Pendukung Desa Wisata di Dewa Leuwilaja, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, 2(1), 160-170.
- Juanda, B., & Siregar, H. (2023). Pola Distribusi UMKM Desa Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kecamatan Biduk Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 12(2), 159-184.
- Kharisma, L., & Juwita, T. (2023). PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BEKAS GALIAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KONSERVASI: Tempat wisata galian Subang. *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, 1(2), 71-79.
- Kualaria, S., Wijayantini, B., & Hanafi, I. (2022). Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 20-26.
- Marlian, S., Sumadinata, W. S., & Sari, D. S. (2021). The Evaluation of Policy Implementation on ASN Performance Appraisal System. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(2), 177-195.
- Maryanti, S. (2022). PARADIGMA PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI PERGURUAN TINGGI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI RIAU. *Jurnal Daya Saing*, 8(3), 484-495.
- Maulana, M. A., Rahmawati, D. E., & Nurmandi, A. (2020). An Analysis of Actors in the Implementation of Public Policy on Accessibility of Persons with Disabilities for Work in Indonesia s Special Region Yogyakarta. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 8(2), 154-161.
- Nursahidin, S. S., & Yusuf, A. A. The Implementation of Policy on Appointment of Permanent Lecturers at Private Universities in the City and Regency of Cirebon. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i1.64>
- Oh, A., Abazeed, A., & Chambers, D. (2021). Policy implementation science to advance population health: the potential for learning health policy systems. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.681602>
- Purba, N. A. U., & Nawangsari, E. R. (2022). Prinsip Saemaul Undong dalam Pengelolaan Desa Wisata oleh BUMDesa di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *JlIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(7), 2142-2147.
- Purwaningtyas, A., Yustita, A. D., & Ermawati, E. A. (2024). Pengembangan Wisata Berbasis Community Based Tourism Di Desa Wisata Kemiren Banyuwangi. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 7(1), 79-83.
- Putra, I. K. (2021). Akselerasi Pertumbuhan Bisnis di Sektor Pariwisata di Era Pandemi Covid 19 Melalui Pendekatan Pentahelix. *Sketsa Bisnis*, 8(1), 34-46.
- Qadiri, F. S., & Wicaksono, I. (2023). Inovasi Digital Berbasis Aplikasi Mall Desa dalam Sektor Pengembangan Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2).
- Ramadhan, M. F., & Prasetijo, A. (2023). Warisan Budaya dalam Konteks Standar Internasional: Penjagaan Warisan Budaya Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Janus*, 1(2), 123-134.
- Rizal, C., & Zen, M. (2023). Optimalisasi Promosi Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa Sei Limbat. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 2(2), 176-181.
- Saiful, B. S. S., Sandra, C., Rokhmah, D., Rochmawati, A. H., & Hidayah, B. I. A. (2022). Availability of information and standard operating procedures affects the implementation of cigarette billboard regulation in Jember, East Java, Indonesia. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 10(1).
- Sakti, F. T., Annaafi, A. M. R., & Somali, S. G. (2021). Implementation Of The Bandung Masagi Policy In The Municipality Of Bandung Indonesia. *International Journal of Social Science*, 1(1), 1-8.

- Salam Ahmad, F. (2022). Dampak pembangunan jalan tol Trans Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 1-18.
- Salam, N. E., Yasir, Y., Firdaus, M., Awza, R., & Lubis, E. E. (2024). Komunikasi Pariwisata Berbasis Komunitas untuk Pengembangan Desa Wisata Budaya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Riset Komunikasi*, 7(1), 159-174.
- Saputra, E., & Agustina, D. (2021). Peran institusi masjid dalam pembangunan ekonomi lokal: Studi kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 174-195.
- Sari, S. R., Basir, M., Natsir, N., & Susanti, A. (2020). Implementation of Kaili language preservation and development in Palu City, Indonesia. *Scholars International Journal of Linguistics and Literature*, 3(7), 208-215.
- Savitri, E., Diyanto, V., Musfialdy, M., & Hamzah, A. PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI SIAK TERINTEGRASI BUMDES BERKAH BERSAMA. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 3(5), 240-250.
- Sianturi, R. A., Turnip, J. T., Fabriyanti, E. F., & Lubis, D. (2021). Perancangan Pengujian Usability Pada Website Desa Wisata Di Kawasan Danau Toba. *Journal of Applied Technology and Informatics Indonesia*, 1(1).
- Smith, N. R., Levy, D. E., Falbe, J., Purtle, J., & Chriqui, J. F. (2024). Design considerations for developing measures of policy implementation in quantitative evaluations of public health policy. *Frontiers in Health Services*, 4, 1322702.
- Styaningrum, F. (2021). Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 656-663.
- Suhaimi, S. N., Putri, T. A., Harahap, A., & Furqan, A. (2024). Analisis Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Wisata Mekarsari, Kabupaten Bandung. *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(2), 160-173.
- Susanto, F. (2023). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan desa wisata tangsi duren kabupaten kepahiang provinsi bengkulu. *Joppas Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.31539/joppas.v5i1.6562>
- Swasono, G. B., & Budiyo, B. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(1), 21-25.
- Wahid, A., & Athoillah, M. A. (2024). Peran Wanita dalam Pembangunan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Islam. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 661-679.
- Wali, W. J. F. S., Rukmana, D. I., & Ningsih, N. (2023). Pendampingan untuk Meningkatkan Potensi Karang Taruna Desa Binor dalam Peluang Bisnis di Era Teknologi Informasi: Assistance to Increase the Potential of the Binor Village Youth Organization in Business Opportunities in the Information Technology Era. *Nusantara Journal of Community Engagement and Empowerment*, 1(2), 52-58.
- Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 25-32.
- Widiyarta, A., Hakim, M. B. A., Setyaningrum, M. D., & Tantriani, T. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wisata Migas di Geopetroleum Teksas Wonocolo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 756-761.
- Widyantoro, A. O., Yudisetyanto, R. A., & Kusri, K. (2024). Diseminasi Keilmuan Fotografi dalam Mendukung Pengembangan Potensi Desa Camden, Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Seni*, 5(1), 1-8.. <https://doi.org/10.24821/jps.v5i1.12520>.